



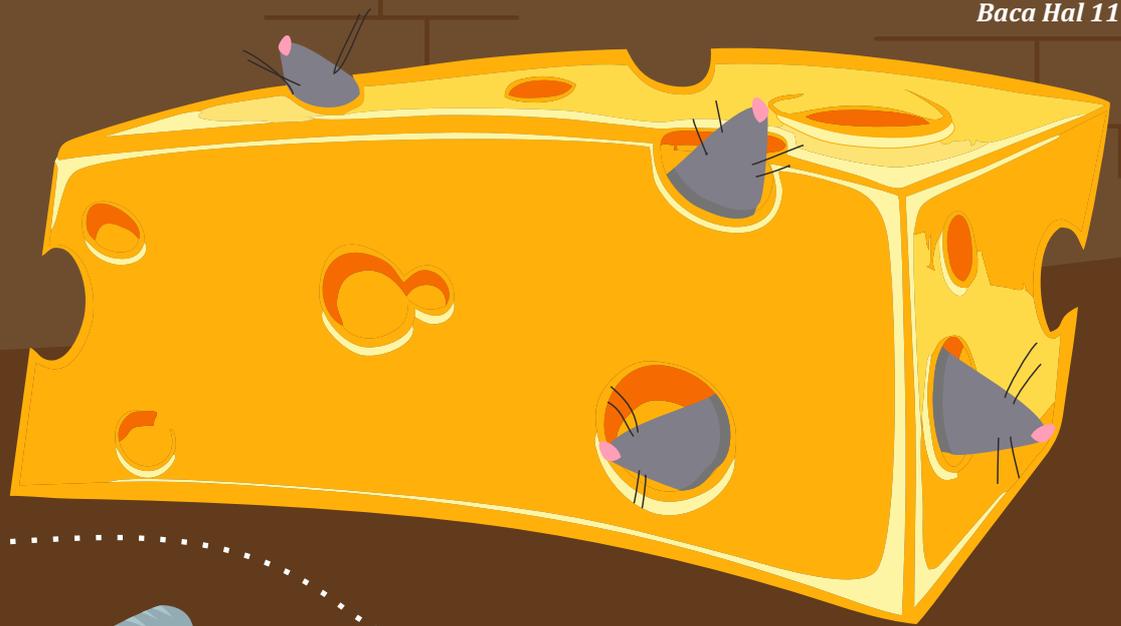
CHECK DIGITAL EDITION

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2020 DANA BENCANA **JADI BANCAKAN,** **RAPOR INDONESIA 'MERAH'**

Bantuan sosial dan dana bencana jadi bancakan koruptor. Korting atau potongan hukuman pelaku korupsi, bahkan ada beberapa yang dibebaskan. Pungutan liar (pungli) hingga money politic bak menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Ironis! Buruknya penanganan kasus rasuah di Indonesia membuat negeri ini mendapatkan rapor merah. Buktinya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 merosot. Rekor pertama kali terjadi sejak 12 tahun lalu. IPK Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara. Tahun sebelumnya, IPK Indonesia mendapat skor 40 dengan peringkat 85 dari 180 negara. Duh!

Baca Hal 11

INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2020 NEGARA DI ASEAN



Rank	CPI 2020	Country	CPI 2019
3	85	Singapore	85
35	60	Brunei Darussalam	60
57	51	Malaysia	53
86	40	Timor Leste	38
102	37	Indonesia	40
104	36	Vietnam	37
104	36	Thailand	36
115	34	Phillippines	34
135	29	Laos	29
137	28	Myanmar	29

very clean ↑
↓ highly corrupt

Menikam Jantung Kebebasan Pers

Sektertris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pada semua pemerintah untuk melindungi wartawan, melawan impunitas, dan memperkuat kebebasan pers.

Guterres menyampaikan secara serius. Diucapkan saat menutup Konferensi Kebebasan Pers Dunia 2020, pada 10 Desember lalu. Jaminan itu adalah kunci terutama di masa pandemi Covid-19.

Pada intinya, pers yang bebas terjamin bisa menyediakan informasi kredibel dan membantu warga memilah fakta dan kebenaran informasi. Juga informasi tentang pandemi.

Tidak ada kebebasan pers jika wartawan tidak bebas melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Termasuk soal kesejahteraan. Wartawan harus terjamin kebebasannya dan hak kesejahteraannya.

Di Tanah Air, tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi pers Indonesia. Tahun 2020

merupakan tahun terburuk kebebasan pers sepanjang era reformasi.

Kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat. Dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga membuat wajah pers semakin buram.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis data: kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2020 naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

LBH Pers mencatat pada tahun 2020 terjadi 117 kasus kekerasan terhadap wartawan dan media. Dengan kata lain, meningkat 32 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 79 kasus.

Dari 117 kasus, sebanyak 99 diantaranya terjadi pada wartawan, 12 kasus pada pers mahasiswa, dan 6 kasus pada media, utamanya media siber.

AJI Indonesia mencatat, tahun 2020 terjadi 84 kasus kekerasan pada wartawan atau bertambah 31 kasus dari tahun 2019 yang berjumlah 53 kasus. Pelakunya: terbanyak aparat keamanan.

Selain kasus meningkat, pola kekerasan juga meluas. Variasinya pun beragam. Kejadiannya tidak terjadi hanya saat wartawan melakukan tugas jurnalistik berupa ancaman fisik dan intimidasi. Lebih dari itu, kian meluas ke serangan digital. Misal: peretasan dan serangan buzzer kepada wartawan atau media.

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Tentu bakal memengaruhi bisnis media atau industri pers -yang pada akhirnya, mengancam wartawan.

Data posko pengaduan untuk wartawan dan pekerja pers yang dibuka LBH Pers dan AJI Jakarta menunjukkan: sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 terdapat 150 pengaduan.

Pers tidak hanya menghadapi tantangan dari negara yang membuat regulasi dan mempunyai domain politik kekuasaan. Tetapi juga kapital industri dimana pers merupakan bagian dari bisnis, oligarki yang menguat serta masyarakat dengan media sosialnya.

Berkaca dari tahun 2020, situasi pada tahun 2021 kemungkinan tak akan jauh beda.

Atau bisa jadi meningkat intensitas
d a n



Foto: Pexels.com

jumlahnya.

Liputan unjuk rasa masih akan menjadi tempat paling rawan bagi wartawan. Serangan siber juga diperkirakan terus terjadi.

Untuk membangun kebebasan, pers (sendiri) harus membangun mekanisme pertahanan diri.

Sekjen PBB Antonio Guterres seolah menghaluskan pesan, "Jangan menikam jantung kebebasan pers!" (ABH)



ARIFIN BOEDI HARYONO
PEMIMPIN REDAKSI LENTERATODAY



DPR PECAH SUARA SOAL JADWAL PILKADA

TUNGGU SIKAP GERINDRA DAN PKB

kursi), NasDem (59 kursi), PKS (50 kursi), Demokrat (54 kursi).

2 fraksi lain yaitu Gerindra (78 kursi) dan PKB (58 kursi) masih belum mengambil sikap.

Jika ditotal, fraksi yang setuju pilkada digelar 2024 yaitu PDIP, PAN, dan PPP bakal memiliki 191 kursi. Sementara total fraksi yang ingin pilkada di 2022 dan 2023 adalah 248 kursi. Sehingga, sikap Gerindra dan PKB akan sangat berpengaruh karena perolehan suara mereka juga besar.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyatakan sikap partainya yang ingin pilkada digelar serentak di 2024. Djarot juga menilai sebenarnya tak perlu ada revisi UU Pemilu.

PDIP beralasan, pilkada harus digelar di 2024 agar Indonesia bisa fokus menangani pandemi di 2022 atau 2023. "Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," kata Djarot.

Sebagai pemilih kursi terbesar kedua di Senayan setelah PDIP, sikap Golkar menjadi sangat penting. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurul Arifin menyatakan partainya memilih normalisasi pilkada sehingga digelar di tahun 2022 dan 2023.

Alasannya, selain beban anggaran yang

akan membengkak di 2024, pengalaman pilpres dan pileg serentak di 2019 banyak memakan korban juga menjadi salah satu pertimbangan. "Kami dari Fraksi Partai Golkar tetap berharap bahwa pilkada itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2022 kan ada 101 daerah yang pilkada dan tahun 2023 ada 170," tutur Nurul.

Berbeda dengan sikap PAN yang hingga saat ini menolak merevisi UU Pemilu. Maka dengan kata lain, PAN mengikuti UU yang lama terkait Pilkada, yaitu digelar serentak di 2024. "Tentu alasan yang dikemukakan adalah untuk memperbaiki kualitas pemilu itu sendiri. Namun demikian, Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU tersebut belum saatnya untuk direvisi," kata Zulkifli Hasan.

Senada dengan PAN, Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan partai berlambang ka'bah itu ingin agar UU Pemilu tak direvisi. Untuk Pilkada, menurut Arsul, sebaiknya mengikuti UU lama.

Berarti, PPP setuju pilkada digelar serentak dengan pemilu nasional di 2024. "Kan kalau sikap dasar PPP yang sudah disampaikan oleh Ketum PPP Suharso Monoarfa tidak ada perubahan UU Pemilu. Berarti UU Pilkadaanya enggak perlu berubah juga. Konsekuensinya begitu," tutur Arsul. (ist)

Jakarta-Sejumlah pasal dalam draf RUU Pemilu belakangan menjadi sorotan. Salah satunya mengenai jadwal pilkada.

Fraksi-fraksi di DPR pun pecah suara soal itu. Ada yang ingin pilkada tetap digelar di 2024 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tapi tak sedikit fraksi yang ingin normalisasi pilkada sehingga pilkada digelar 2022 dan 2023, dengan cara merevisi UU Pemilu dan menggabungkan UU Pilkada.

Menurut catatan, sementara ini ada 3 fraksi yang mendukung Pilkada digelar serentak di 2024 dan ada 4 fraksi yang menginginkan Pilkada tetap digelar secara normal yaitu di 2022 dan 2023. 2 fraksi lain belum mengambil sikap soal jadwal pilkada.

3 fraksi yang ingin pilkada di 2024 yaitu PDIP (128 kursi), PPP (19 kursi), PAN (44 kursi). Sementara yang ingin pilkada digelar 2022 dan 2023 ada 4 fraksi yaitu Golkar (85

Kata Mereka



**KETUA HARIAN DPP GERINDRA
SUFMI DASCO AHMAD**

"Kami juga sedang menghitung dan kami kaji dan sedang kami minta pendapat dari parpol lain mengenai perlu tidaknya pilkada 2022."



**WAKIL KETUA UMUM DPP PKB
JAZILUL FAWAID**

"PKB masih mengkaji, prinsipnya mempertimbangkan kesiapan teknis pelaksanaan, anggaran dan dampaknya. Bila secara teknis siap dapat saja dilaksanakan pada tahun 2022. PKB cenderung diadakan tahun 2022 sesuai agenda yang ada agar tidak berdampak pada banyaknya Plt kepala daerah."

PETA DPR SOAL JADWAL PILKADA

PILKADA DIGELAR SERENTAK DI 2024

- PDIP (128 kursi)
- PPP (19 kursi)
- PAN (44 kursi)
- Total 191 kursi

PILKADA TETAP DIGELAR SECARA NORMAL YAITU DI 2022 DAN 2023

- Golkar (85 kursi)
- NasDem (59 kursi)
- PKS (50 kursi)
- Demokrat (54 kursi)
- Total 248 kursi

BELUM AMBIL KEPUTUSAN

- Gerindra (78 kursi)
- PKB (58 kursi)



Foto: Kunhawan / LenteraToday



Petugas memeriksa bed pasien di dalam kereta yang telah dipasang sementara untuk mengantisipasi kebutuhan isolasi pasien Covid-19 di Madiun, Jawa Timur.

MADIUN – Berbagai kebijakan baru terus muncul menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19, termasuk mengenai aturan bagi penumpang kereta api. Saat ini surat negatif hasil GeNose Test bisa ditunjukkan sebagai syarat perjalanan. Sementara itu, di dalam kereta penumpang dilarang bicara selama perjalanan.

"GeNose Test bisa dipakai. "Kurang dari 2 menit, tabung tersebut mendeteksi infeksi yang keluar bersama dengan nafas seseorang. Tingkat akurasinya mencapai 97 persen. Jadi

ATURAN BARU PENUMPANG KERETA API BISA PAKAI HASIL GENOSE TEST, DILARANG BICARA SELAMA PERJALANAN

langsung terlihat orang tersebut terinfeksi atau tidak," jelas Manager Humas PT. KAI Daop 7, Ixfan Hendriwindoko, Kamis (28/01).

Dia mengatakan aturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan No 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian dalam masa Pandemi Covid-19.

GeNose Test sendiri merupakan alat pendeteksi Covid-19 dengan cara orang tersebut menghembuskan nafas kedalam tabung khusus. Sensor dalam tabung tersebut akan membaca bahwa orang tersebut terinfeksi Covid-19 atau tidak. Sedangkan calon penumpang wajib mengambil sampel GeNose Test maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Ixfan menjelaskan bahwa biaya layanan GeNose Test akan lebih murah dibandingkan dengan rapid tes Antigen atau RT-PCR. Namun layanan GeNose Test sendiri baru akan tersedia di Stasiun Gambir Jakarta dan Stasiun Tugu Yogyakarta pada Jumat (05/

02/2021) mendatang. "Saat ini masih dalam tahap persiapan bersama pihak Universitas Gadjah Mada dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Stasiun lainnya bertahap, harga alatnya tidak murah soalnya," ujarnya.

Sampai saat ini PT. KAI Daop 7 Madiun dan 45 stasiun lainnya masih tetap melayani rapid test antigen dengan harga Rp. 105.000.

Aturan lainnya yaitu, penumpang kereta api dilarang berbicara satu arah maupun dua arah selama perjalanan, baik berbicara secara langsung maupun lewat telepon. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain peraturan tersebut, peraturan lain yang tidak kalah ketat adalah penumpang kereta api (KA) jarak dekat atau perjalanan kurang dari 2 jam tidak diijinkan makan atau minum selama perjalanan berlangsung.

"Memang seperti itu kebijakannya. Terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut," jelasnya.(ger)

FAKTOR USIA, DUA KEPALA DAERAH DI BLITAR RAYA TAK DIVAKSIN SINOVA

BLITAR - Dua orang kepala daerah di Blitar Raya, Bupati Blitar Rijanto dan Walikota Blitar Santoso, tidak masuk daftar orang yang akan divaksin Sinovac. Salah satu alasannya adalah faktor usia.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Blitar, Didik Djumianto menuturkan dari 10 orang yang rencananya akan divaksin pada saat launching vaksinasi Covid-19 memang tidak ada nama Walikota Blitar, Santoso. "Karena untuk divaksin, harus memenuhi beberapa persyaratan," tutur Didik, Kamis (28/01).

Lebih lanjut Didik menunjukkan daftar 10 orang yang akan divaksin, pada saat launching vaksinasi Covid-19 Kota Blitar di RSUD Mardi Waluyo, Sabtu (30/01). Bahkan tidak seluruh Forkopimda Kota Blitar masuk dalam daftar nama yang akan divaksin, diantaranya Walikota Blitar Santoso, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar juga tidak tercantum.

Dalam daftar 10 orang calon penerima vaksin tertulis: Sekkota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, Danyon 511 Blitar, Kapolres Blitar Kota, Ketua IDI Kota Blitar, Wakil Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Perwakilan Kemenag Kota Blitar, Pengurus MUI, Pengurus NU dan Pengurus Muhammadiyah. "Jadi tidak harus semua Forkopimda divaksin, kalau tidak memenuhi syarat," jelasnya.

Adapun syarat untuk bisa divaksin Sinovac diantaranya berusia antara 18-59

tahun, belum pernah positif Covid-19, tidak hamil/menyusui, tidak mengalami gejala sakit ISPA (batuk, pilek dan sesak) 7 hari terakhir, tidak kontak erat dengan positif Covid-19 atau dalam perawatan Covid-19, tidak memiliki riwayat sakit diabetes, jantung, rematik, ginjal, pencernaan kronis dan kanker. "Jadi kalau tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, tentu tidak wajib divaksin," jelasnya.

Seperti Walikota Blitar, Santoso diungkapkan Didik tidak masuk daftar yang divaksin, karena faktor usia di atas 59 tahun. Termasuk nama Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dr Ramiadji akan digantikan wakil direktornya. "Tidak ada faktor lainnya, seperti pernah positif Covid-19 atau menderita penyakit lainnya tidak ada," ungkap Didik.

Demikian juga Bupati Blitar, Rijanto yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada Februari 2021 mendatang. Juga dipastikan tidak mendapat vaksin buatan Cina tersebut, karena usianya lebih dari yang disyaratkan. "Usia Pak Bupati kan 68 tahun, jadi tidak memenuhi syarat," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti.

Selain itu Bupati Blitar Rijanto juga kormobid, yakni memiliki riwayat sakit jantung. Sehingga tidak masuk dalam 10 orang yang akan divaksin, pada saat launching



Bupati Blitar, Rijanto (kiri) dan Walikota Blitar, Santoso

vaksinasi di RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi Jumat(29/1/2021) besok. "Ada 10 orang yang ditunjuk pada launching vaksinasi besok, diantaranya Pak Wabup Blitar, Dandim, Ketua PN, Kapolres Blitar, Pimpinan DPRD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada tahap pertama vaksin Sinovac yang bertujuan mencegah agar tidak mudah terpapar Covid-19 ini, untuk Kota Blitar mendapat 1.240 dosis dan Kabupaten Blitar 3.000 dosis. Kali ini vaksin fokus diberikan untuk tenaga kesehatan dan pendukungnya. Pada fasilitas pelayanan kesehatan vaksinasi yang sudah ditentukan yakni di Kota Blitar ada 11 lokasi dan Kabupaten Blitar 32 lokasi.(ais)

TEKAN KLASER DUNIA KERJA, SURABAYA SUDAH ASESMEN 135 PERKANTORAN

SURABAYA - Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terus melakukan asesmen risiko penularan Covid-19 di berbagai perkantoran. Sasarannya baik perkantoran pemerintahan maupun swasta. Asesmen ini untuk melihat langsung pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) sesuai dengan Perwali No. 67 tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kali ini, asesmen dilakukan di kantor Graha Bukopin Jalan Panglima Sudirman dan Sinar Mas Land Plaza Jalan Pemuda, Surabaya, Kamis (28/01). Asesmen dipimpin Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febriadhitya Prajatarata yang sekaligus Kabag Humas Pemkot Surabaya.

"Jadi, hari ini kami melakukan asesmen di dua tempat, dan secara overall protokol kesehatannya sudah bagus. Total hingga saat ini sudah 135 perkantoran baik swasta maupun pemerintahan yang sudah dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya," kata Febri.

Asesmen dilakukan dengan beberapa poin penilaian, mulai ketersediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai WFH 75 persen, WFO 25 persen sesuai dengan aturan PPKM, dan beberapa aturan lainnya.

"Bahkan, saat itu kami tidak hanya sekadar melihat-lihat saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada Satgas Perkantoran itu dalam melakukan pengaturan kapasitas ruangan. Jadi, ruangnya itu diukur berapa meter persegi, kemudian baru bisa ditentukan dalam satu ruangan itu harus diisi oleh berapa orang, kami beri pengetahuan itu juga," kata dia.

Febri juga memastikan pada saat asesmen itu, pihaknya juga sudah memberikan beberapa masukan, termasuk masukan untuk memberikan tempelan di setiap ruangan. Artinya, ketika sudah dilakukan pengukuran kapasitas ruangan dan sudah diketahui berapa kapasitas maksimal ruangan tersebut, lalu kapasitas ruangan tersebut dituangkan dalam sebuah kertas



Foto: Andri/LenteraToday

dan ditempelkan di ruangan itu. "Sehingga diharapkan ketika melihat tempelan itu, orang sudah bisa mentaati," ujarnya.

Dijelaskannya setelah kantor tersebut dilakukan asesmen, maka nantinya akan diberikan surat rekomendasi oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya. Terutama terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang mungkin harus diperbaiki dan disempurnakan. "Nanti teman-teman satgas yang akan memberi rekomendasi ini," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi Satgas mandiri di dua perkantoran tersebut. Pasalnya, di kantor itu ada peraturan bahwa ketika ada karyawannya yang diketahui tidak memakai masker, maka akan didenda sebesar Rp 250 ribu perorang. "Jadi, mereka membuat peraturan sendiri, dan itu saya kira sangat bagus," pungkasnya. (Ard)



Walikota Batu, Dewanti Rumpoko saat divaksin

Malang-Kota Malang dan Kota baru sama sama melakukan vaksinasi perdana Kamis (28/01). Walikota Batu, Dewanti Rumpoko dan Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menjadi orang pertama yang mendapat vaksin di dua kota di Provinsi Jatim itu.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko beserta forkopimda dan tokoh masyarakat Kota Batu menjalani penyuntikan tahap pertama, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. "Saya tadi deg-degan, makanya tensi darahnya tinggi. Bukan hanya saya, Pak Sekda tadi juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lega" ucapnya Dewanti usai acara.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari mengatakan Pen-

KOTA MALANG DAN BATU MEMULAI VAKSINASI

canangan Vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini juga diberikan kepada 125 tenaga kesehatan di Kota Batu. "Hari ini, kami juga memberikan vaksin kepada 125 nakes di lima desa, diantaranya Beji, Junrejo dan Pandanrejo. Besok akan datang lagi vaksin dari pusat, semoga semua berjalan dengan lancar" kata drg. Kartika.

Selain Walikota Batu, beberapa Forkopimda yang mendapatkan vaksinasi diantaranya Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, Kajari Kota Batu Supriyanto, Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi dan Kepala Dinkes Kota Batu, drg. Kartika.

Sementara di Kota Malang Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengaku suhu badannya sedikit meninggi usai melakukan penyuntikan. Berdasarkan penuturan petugas vaksinator, kata Edi, hal merupakan efek samping dari vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh.

"Kondisi tersebut terjadi lantaran tubuh berusaha beradaptasi dan mulai mengenali vaksin yang dimasukkan untuk selanjutnya mulai membentuk antibodi. Kata petugas tubuh akan beradaptasi sekitar 30 menit," katanya.

Kendati sempat mengalami reaksi suhu

tinggi, Wawali yang lekat disapa Bung Edi itu tetap mewanti masyarakat agar tidak berpengaruh informasi hoax tentang vaksin. Baginya vaksinasi ini demi kepentingan semua warga Indonesia serta dijamin aman dan halal.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan nantinya bisa mengikuti jadwal vaksinasi sesuai tahapan yang ditetapkan," sambungnya.

Diketahui, Kota Malang mendapatkan jatah vaksin Covid-19 pada tahap I sebanyak 6.450 orang. Sedangkan pada Februari 2021 mendatang, pada tahap I termin kedua, jumlah tenaga kesehatan (nakes) di Kota Malang mendapat jatah sebanyak 12.897 orang. (Sur)



Dari kiri Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Influencer Gilang Widya Pramana, sedang menunjukkan hasil vaksin.

LIMA

TUJUAN WISATA SUPER PRIORITAS DI INDONESIA

Presiden Joko Widodo sedang fokus mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di lima destinasi super prioritas Indonesia, sebagian besar masyarakat mungkin sudah mengenal tempat tersebut namun ada juga yang masih meraba-raba.

Lima destinasi wisata super prioritas yang menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Bagi Anda yang belum mengenal lima destinasi wisata super prioritas tersebut, berikut ini adalah daftarnya,



Walaupun sangat terkenal dengan keunikan wisata komodo di Taman Nasional Komodo serta Pink Beach, ada juga rekomendasi lain seperti menyaksikan matahari terbenam di Bukit Sylvia karena daerah ini terkenal dengan istilah seribu sunset, trekking Pulau Padar dan Kanawa.

Kemudian rasakan pengalaman bawah laut penuh pesona di beberapa titik selam seperti Batu Bolong, Castle Rock dan Manta Point.



Hilangkan penat dan lelah dengan mengunjungi hidden gems di NTB. Tidak hanya menyuguhkan keindahan pantai alami dengan berselancar seperti Pantai Gerupuk, Pantai Kuta, Pantai Seger, atau Tanjung Aan, tetapi juga menawarkan wisata budaya bernilai untuk dipelajari.

Yang paling terkenal adalah Festival Bau Nyale, sebuah acara lokal di Mandalika di mana masyarakat berkumpul untuk berburu cacing tanah.



Kemendikbud menunjuk Danau Toba sebagai ikon baru pariwisata Indonesia berbasis keindahan alam. Sebagai keajaiban dunia yang menakjubkan, danau kawah ini begitu besar dan di tengah danau ini terdapat sebuah pulau yang ukurannya hampir sebesar Singapura.

Bagi pecinta kopi, terdapat biji kopi arabika nikmat bernama Sumatra Mandheling yang dapat dicoba.



Likupang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nama daerah ini menjadi perbincangan hangat di tahun 2020 karena pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah satu destinasi super prioritas. Artinya pemerintah akan memaksimalkan pembangunan pariwisata dari berbagai aspek. Daerah ini juga sedang dipersiapkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Bagi turis yang berkelana ke Likupang Barat, terdapat Desa Bahoi yang merupakan desa nelayan yang memiliki ekowisata mandiri untuk menjaga ekosistem laut. Ekowisata Desa Bahoi ini terdiri dari hutan bakau yang berada di tepi laut.



Salah satu warisan budaya dunia UNESCO, Candi Borobudur ini sering dianggap berada di kota Yogyakarta padahal sebenarnya berada kota Magelang, tepatnya di jalan Badrawati dengan akses mudah karena terletak di pinggir jalan.

Bagi masyarakat yang menjadikan kunjungan ke Candi Borobudur sebagai salah satu impian teratas, maka harus juga memasukkan beberapa lokasi wisata sekitar Candi Borobudur ke dalam rencana perjalanan seperti Punthuk Setumbu, Bukit Rhema Gereja Ayam, Pemandian Candi Umbul, Pinus Kragilan, Candi Ratu Boko, hingga Tebing Breksi.

Jawa Tengah masih sangat kental dengan budaya dan adat Jawa, maka tidak heran jika banyak destinasi wisata yang merupakan peninggalan sejarah. Saat ini, candi-candi tersebut telah dipugar dan dibuka untuk umum (Ant).

TANDA KURANG GERAK, SERING LELAH HINGGA MUDAH LUPA

Pakar kesehatan menyarankan Anda mengurangi perilaku sedenter atau diam berkepanjangan menjadi tidak lebih dari 60 menit. Tetapi Anda mungkin belum terbiasa dan malah terlalu banyak duduk? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan setiap orang melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang 150-300 menit atau 75 hingga 150 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu, ditambah dua hari latihan kekuatan. Selain itu, ada beberapa tanda yang bisa Anda amati jika Anda tidak cukup bergerak yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik Anda, mengutip dari Real Simple:

1. MERASA LELAH SEPANJANG WAKTU

Memang benar, kelelahan bisa karena berbagai hal semisal stres, pola makan yang buruk, ketidakseimbangan hormon, tetapi tidak banyak bergerak juga berperan dalam kelelahan ekstrem.

2. SERING MERASA KEHABISAN NAPAS

"Jantung bekerja dengan aliran oksigen yang baik," kata ahli jantung di Philadelphia, Sanul Corrielus. Semakin seseorang diam, maka semakin besar dia berisiko mengalami kematian dan penyakit jantung.

3. PERUBAHAN BERAT BADAN

Tanda lain Anda kurang bergerak, ada perubahan pada berat badan dan metabolisme Anda. Cara Mengatasinya Anda harus membakar kalori dalam jumlah yang sama dengan yang Anda konsumsi.

5. KESEHATAN MENTAL MENURUN

Penelitian menunjukkan, orang-orang yang lebih banyak duduk mengalami penurunan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup.

4. MELEWATKAN WAKTU TIDUR BERKUALITAS

Tidur itu berharga dan jika durasi dan kualitasnya tak cukup maka bisa menyebabkan masalah metabolisme, melemahkan sistem kekebalan Anda, meningkatkan risiko kematian dini, dan masalah lainnya.

6. SULIT DALAM MENINGAT

Otak Anda membutuhkan olahraga seperti halnya tubuh. Menurut penelitian PLOS One, berjam-jam duduk menyebabkan berkurangnya ketebalan di lobus temporal medial, area otak yang bertanggung jawab atas memori dan ini alasan Anda menjadi pelupa. Melakukan latihan aerobik seperti jalan treadmill tidak hanya dapat meningkatkan area ini, tetapi juga membantu masalah kognitif terkait usia seperti demensia (Ant).

PENJUALAN GALAXY S21 BISA TEMBUS 2,4 JUTA UNIT



Penjualan lini smartphone baru Samsung Electronics, Galaxy S21, mencapai 2,4 juta unit tahun ini di Korea Selatan.

Penjualan Galaxy S21 40 persen lebih besar dari Galaxy S20 yang terjual sekitar 1,7 juta unit tahun lalu.

Seri Galaxy S20 hadir di tengah pandemi virus corona. Sementara, seri Galaxy S21 muncul satu bulan lebih awal dari jadwal biasanya. Model paling murah S21 harganya 999.900 won (sekitar Rp12,7 juta), terbilang murah untuk ponsel 5G Samsung.

Counterpoint Research, mengutip kantor berita Yonhap (Senin, 25/1/2021), menulis adanya peningkatan permintaan untuk ponsel unlocked atau yang tidak terikat kontrak dengan operator seluler akan mendorong penjualan Galaxy S21.

Ponsel yang tidak terikat kontrak dengan operator seluler, artinya pengguna tidak perlu mendaftar untuk paket bulanan 5G yang mahal atau layanan tambahan ketika mereka mendapatkan perangkat tersebut.

Samsung telah menambahkan lebih banyak pilihan warna untuk S21 Ultra, model premium dari jajaran S21, untuk menarik lebih banyak pengguna yang ingin membeli smartphone tersebut.

Counterpoint Research memprediksi penjualan smartphone Samsung dan Apple kemungkinan besar akan meningkat tajam di Korea Selatan tahun ini dengan kemungkinan keluarnya LG Electronics dari bisnis smartphone.

Perusahaan riset pasar itu sebelumnya memperkirakan Samsung menguasai 65 persen pasar smartphone domestik tahun

ini, disusul Apple dengan 22 persen.

Samsung telah membuka pra-pemesanan atau pre-order flagship terbaru seri Galaxy S21 mulai Kamis malam (14/1/2021) untuk pasar Indonesia, tepat setelah perangkat tersebut masuk pasar secara global.

Harga mulai dari Rp12,999 juta untuk Galaxy S21, Rp15,999 juta untuk Galaxy S21+, dan Rp18,999 juta untuk Galaxy S21 Ultra.

Dalam situs resminya, Samsung memberikan opsi pengambilan barang di toko atau pengiriman secara online kepada konsumen yang akan memesan perangkat tersebut.

Samsung Galaxy S21 tersedia dalam pilihan warna Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink dan Phantom White dengan varian model 128GB dan 256GB dengan 8GB RAM (Ant).

BEAUTY TOOLS JADE ROLLER DAN GUA SHA

Apa Sih Itu?

Berbagai treatment kecantikan sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang dulu. Tak hanya resep/ramuan untuk merawat kulit, tapi juga banyak alat-alat penunjang untuk peremajaan kulit. Salah satu beauty tools kekinian adalah jade roller dan Gua Sha. Beauty tools seperti jade roller dan Gua Sha sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan telah dipakai di Cina sebagai alat untuk pengobatan. Keduanya dibedakan bentuknya dan cara penggunaannya. Mau tahu cara penggunaan dan khasiatnya? Simak yuk!



JADE ROLLER

Sebenarnya apa itu jade roller? Jade roller merupakan salah satu alat kecantikan berbentuk tongkat yang memiliki roller dari batu giok/jade di salah satu atau kedua sisi ujungnya. Jade roller pada dasarnya menghasilkan suatu bentuk pijatan yang mendorong cairan tubuh menuju kelenjar getah bening, kemudian memproses dan menyaringnya keluar dari sistem tubuh.

Penggunaan jade roller dipercaya dapat memberi banyak manfaat bagi tubuh berkat adanya energi (chi) yang positif, diantaranya mampu membantu proses detoksifikasi dari dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot-otot wajah, meningkatkan kilau cerah wajah, dan bantu atasi wajah yang terlihat bengkak. Untuk merasakan manfaatnya, gunakan secara konsisten setiap hari atau setidaknya 3 kali seminggu.

GUA SHA

Gua sha adalah nama teknik pijatan dengan cara menggesek secara berulang pada bagian tubuh tertentu menggunakan sebuah alat, atau mirip seperti kerokan di Indonesia. Bedanya, gua sha menggunakan kepingan batu giok berujung tumpul. Gua sha pada awalnya digunakan untuk memijit area tubuh, namun saat ini juga populer di kalangan beauty enthusiast untuk memijat wajah.

Aplikasikan face oil sebelum menggunakan gua sha, lalu lakukan pijatan dengan urutan seperti jade roller. Perbedaannya, kamu perlu menggesek batu ke area wajah (mengenai garis rahang, pipi, dan dahi), kemudian beralih ke smile lines dan sekitar mulut dengan gerakan zig-zag. Jangan lupa, setiap gerakan harus diulangi tiga kali. Hasilnya, gua sha mampu mengurangi ketegangan pada leher dan rahang. (ist)

Foto : Sonia Roselli / Unsplash

Indeks Persepsi *(dari hal 1)*

Transparency International sudah melakukan survei terhadap IPK Indonesia sejak tahun 1995. Selama kurun 1995 hingga 2020, tercatat penurunan IPK hanya terjadi 4 kali. Penurunan pertama kali terjadi pada 1998. Skor turun dari 27 menjadi 20. Lalu pada 1999, skor turun dari 20 menjadi 17. Penurunan terakhir kali terjadi pada 2007, skor turun dari 24 menjadi 21.

Untuk di tingkat ASEAN, posisi pertama dengan IPK tertinggi adalah Singapura dengan angka 85; diikuti oleh Brunei Darussalam di angka 60; Malaysia di angka 51; Timor Leste di angka 40; lalu Indonesia di angka 37.

Di bawah Indonesia, ada Vietnam dengan angka 36; Thailand dengan angka 36; Filipina angka 34; Laos dengan angka 29; Myanmar dengan angka 28; dan Kamboja dengan angka 21.

Mantan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, menilai penurunan ini tidak bisa dipandang remeh. Sebab, lebih dari satu dekade, IPK Indonesia tidak pernah turun. "Bukan lagi lampu kuning, tapi lampu merah," kata Laode Syarif dalam konferensi pers peluncuran IPK Indonesia yang digelar Transparency International Indonesia, Kamis (28/1).

IPK Indonesia 2020 yang mendapat skor 37 ini bahkan sama seperti skor tahun 2016. "Kita kembali ke tahun 2016, lima tahun ke belakang, jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja," ujar Laode Syarif yang merupakan Direktur Eksekutif Kemitraan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menilai penurunan tersebut salah satunya dilatarbelakangi adanya bencana pandemi COVID-19. Ghufron menyebut pandemi corona membuat aturan yang ketat, semisal pengadaan barang dan jasa harus melalui lelang, dilonggarkan demi kecepatan. Sehingga pengadaan barang dan jasa bisa melalui penunjukan langsung. Ironisnya, kelonggaran itu diduga dimanfaatkan oknum-oknum untuk korupsi.

"Hasil CPI (Corruption Perceptions Index) yang turun karena mungkin salah satunya momen COVID-19. Mengakibatkan relaksasi-relaksasi ketentuan pengadaan barang dan jasa, mestinya ada ketentuan ketat, tapi demi kemanusiaan dilonggarkan karena perlu kecepatan untuk menyelamatkan rakyat. Tapi kelonggaran itu dijadikan kesempatan untuk korupsi," ujar Ghufron dalam acara yang digelar Transparency International Indonesia (TII) secara virtual, Kamis (28/1).

Ghufron menyebut momentum bencana, seperti COVID-19, dimanfaatkan untuk korupsi memang kerap terjadi. Bencana yang seharusnya membangkitkan solidaritas bangsa membantu warga terdampak, justru merupakan lahan bancakan bagi sejumlah oknum tertentu.

"Ini bukan hanya 2020, di banyak bencana ternyata bencana itu membawa korupsi. Ini aware, kita mestinya di kala bencana kesadaran bersama, solidaritas. Tapi faktanya bangsa kita bencana jadi

bancakan untuk korupsi," ucapnya.

Ghufron memang tak menyebut contoh bencana yang dikorupsi. Namun saat ini KPK tengah mengusut dugaan suap bansos corona bagi warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Survei dilakukan sejak awal 2020 hingga Oktober 2020. Terdapat tiga indikator dalam IPK Indonesia yakni ekonomi dan investasi yang mengalami stagnansi dan cenderung turun; penegakan hukum dengan kualitas yang stagnan; politik dan demokrasi mengalami penurunan skor yang artinya sektor politik masih rentan terhadap korupsi.

TII menyarankan agar pemerintah memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.

Menanggapi riset TII, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutnya sebagai penurunan IPK terparah. Sejak 1997, IPK Indonesia mengalami kenaikan perlahan atau minimal stagnan.

Meski demikian, Mahfud tidak kaget dengan penurunan karena revisi UU KPK yang ditolak secara luas oleh masyarakat. Kemudian, terdapat faktor lain maraknya penyuntatan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung selama 2020.

"Sebagai persepsi it's okay, karena itu selalu muncul, meskipun ketika bicara soal data. Apa yang dilakukan, berapa uang yang diselamatkan pada tahun pertama itu. Tentu bisa disimpulkan secara hati-hati," ujar Mahfud dalam acara sama.

Menurut Mahfud IPK Indonesia bisa saja naik jika riset berjalan hingga Desember 2020. Saat itu ada momentum KPK menangkap dua orang menteri, Edhy Prabowo dan Juliar Batubara.

Hal lain yang mempengaruhi adalah fenomena pematangan hukuman koruptor di tingkat Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2020. "Yang selalu juga menyebabkan saya akan berpikir persepsi tentang korupsi itu tidak akan baik, karena justru di tahun 2020 itu marak sekali korting hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung," kata Mahfud.

"Atau pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya, bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi sebagai sebuah korupsi, kalau tidak bebas di kasasi kadang kala juga dikurangi di PK-nya dan sebagainya," sambungnya.

Mahfud berpendapat fenomena tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Tanggapan Istana

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menanggapi terkait Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International yang merosot ke peringkat 37.

Jaleswari mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memberikan arahan bahwa korupsi adalah musuh negara dan tidak akan diberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini.

"Presiden juga mengingatkan khususnya pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan hukum untuk menakuti, memeras, dan korupsi, ini membahayakan agenda nasional," kata Jaleswari dalam keterangan pers, Kamis (28/01).

Jaleswari juga mengatakan pemerintah bersama dengan KPK sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi, akan terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan di hulu melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dia juga mengklaim evaluasi terhadap implementasi Stranas PK tahun 2019-2020 di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi menunjukkan beberapa perbaikan sistemik.

"Di fokus sektor perizinan dan tata niaga, aksi penghapusan izin gangguan dan surat keterangan domisili usaha yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, telah mempermudah syarat berusaha dan menghemat waktu 14 hari dalam pengurusan izin khususnya bagi pelaku UMKM," beber Jaleswari.

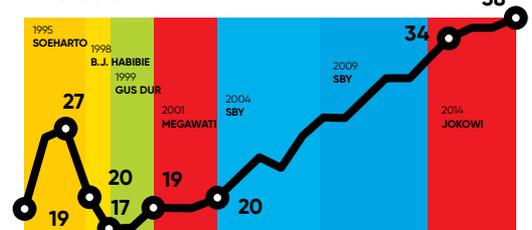
Sementara itu untuk percepatan implementasi Online Single Submission pun terus didorong guna mempercepat layanan perizinan dan mencegah pungli dalam layanan dasar. Di sektor keuangan negara, kata dia pembenahan proses pengadaan barang jasa melalui penerapan e-katalog local di 6 provinsi dan e-katalog sektoral di 5 kementerian dengan volume pengadaan barang jasa yang sangat besar dan kompleks telah mampu meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

"Di sektor reformasi birokrasi aksi penguatan sistem merit melalui penggunaan sistem informasi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi ASN juga mampu mencegah jual beli jabatan," ungkap Jaleswari.

Jaleswari mengklaim nantinya pemerintah berkomitmen memperbaiki upaya pencegahan korupsi dan menyusun strategi perbaikan aksi Stranas PK di Tahun 2021-2022. Yaitu dengan memperhatikan masukan, riset, dan kajian diantaranya Global Corruption Barometer dan Indeks Persepsi Korupsi.

"Pelaksanaan aksi Stranas PK 2021-2022 ini akan terus ditingkatkan sinergi dan kolaborasinya tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga swasta, dan masyarakat sipil (CSO, akademisi, dan media massa) sehingga diharapkan aksi Stranas PK semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata terhadap perbaikan kualitas layanan publik," tandas Jaleswari.(ist,ins)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 1995-2018



NOW!!!



Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan menjalani pemeriksaan sebelum disuntik vaksin Sinovac.



Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan bersama pejabat pemerintah, saat mendapatkan vaksin perdana di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Pasuruan Kamis (28/01/2021).

WAKSINASI BENTUK KEPEDULIAN KITA KEPADA SESAMA

Tujuan vaksinasi untuk membentuk imun /kekebalan diri dan kekebalan kelompok (herd immunity). Ini merupakan upaya kita semua untuk menekan laju infeksi corona di Kabupaten Pasuruan.

Keikutsertaan semua pihak dalam vaksinasi ini adalah bentuk kepedulian kepada sesama. Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan. Juga bentuk bakti kita kepada bangsa dan negara Indonesia.



Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan saat mendapatkan vaksin perdana di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Pasuruan Kamis (28/01/2021).

WAKSINASI PERDANA DI KABUPATEN PASURUAN

Vaksinasi perdana, Kamis (28/01) disuntik kepada Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Vaksinasi tahap pertama ini juga dilakukan serentak di RSUD Bangil, RSUD Grati, RS Prima Husada, dan puskesmas maupun klinik. Tenaga kesehatan menjadi target utama sebab mereka adalah garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19.

JANGAN KENDOR TERAPKAN PROKES

Masyarakat tetap diminta tidak kendor dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan meski vaksinasi sudah dimulai.

WAKSINASI LANGKAH NEGARA MELINDUNGI RAKYAT

Semua masyarakat Kabupaten Pasuruan diminta untuk mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 ini. Sebab, vaksinasi merupakan langkah yang diambil oleh negara dalam rangka melindungi setiap warganya.

TAHAP PERTAMA ADA 3.640 DOSIS

Vaksinasi pertama akan diberikan kepada 10 pejabat publik dan 3630 tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19.

BENTUK IKHTIAR KEPADA ALLAH

Vaksinasi Covid-19 menjadi harapan baru. Tak hanya melepaskan belenggu pandemi, tapi juga untuk menggerakkan sektor perekonomian kembali. Vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar hambanya kepada sang pencipta, Allah S.W.T semoga pandemi ini segera berakhir.

